



Indeks Kemahalan Wilayah, 2019

ABSTRAKSI

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 79 ayat 1 mengamatkan bahwa pemerintah wajib memberikan gaji yang adil dan layak kepada ASN serta menjamin kesejahteraanya. Penyeragaman penggajian ini bermuara pada pola penggajian tunggal atau single salary system. Konsep single salary pegawai diartikan bahwa pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Pasal 80 undang-undang nomor 5 tahun 2014 menyebutkan bahwa selain gaji, ASN juga diberikan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Kemahalan suatu wilayah ditentukan oleh harga barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan tingkat kemahalan dalam mengkonsumsi/membelanjakan satu set komoditas yang sama antar wilayah dalam kajian ini dikenal sebagai Indeks Kemahalan. Potret pola konsumsi masyarakat Indonesia dapat diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas). Tingkat daya beli untuk kebutuhan pembangunan rumah dicakup dalam survei harga kemahalan konstruksi dan merupakan bagian dari penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Sehingga untuk tujuan identifikasi tingkat kemahalan wilayah dikaitkan dengan gaji ASN digunakan indeks yang merupakan komposit dari paritas daya beli konsumsi dan paritas daya beli bangunan tempat tinggal. Dengan proporsi berdasarkan Tabel Input-Output Indonesia, pembelian barang dan jasa untuk konsumsi sekitar 85% dari total konsumsi (pengeluaran dalam bentuk investasi untuk tempat tinggal = 15%).

Penghitungan harga implisit dari value dan quantity pada komoditas makanan di Susenas hanya dilakukan pada kelompok pengeluaran di atas desil 3. (Asumsi: Pengeluaran ASN sudah jauh diatas garis kemiskinan). Sehingga didapatkan nilai IKW tertinggi yang dihasilkan bila menggunakan harga komoditas penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan lebih dari Rp 633.717 (desil 4+) yaitu Kabupaten Puncak. Sedangkan nilai IKW terendah yang dihasilkan yaitu sebesar Kabupaten Lampung Timur. Sementara kajian masih dilakukan, sebelum diperoleh angka final.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

(1) Tujuan Perjanjian ini untuk melaksanakan Penyusunan Indeks Kemahalan Wilayah, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam bidang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil.

(2) Indeks Kemahalan Wilayah merupakan indeks harga relatif yang menggambarkan tingkat kemahalan relatif di setiap Kabupaten/Kota dengan DKI Jakarta sebagai acuan yang digunakan untuk membayarkan Tunjangan Kemahalan.

Penanggung Jawab Kegiatan

PENYELENGGARA

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEMENPAN-RB

ALAMAT PENYELENGGARA

Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

NAMA
Sunggul Jansihar Simanjuntak

JABATAN
Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja Kemenpan RB

ALAMAT
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

TELEPON
(021) 7398381-89

FAX
(021) 7398323

EMAIL
halomenpan@menpan.go.id

Penanggung Jawab Teknis Kegiatan

NAMA
Sri Soelistyowati

JABATAN
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik

ALAMAT
Jl. Dr Soetomo No. 6-8, Jakarta Pusat

TELEPON
(021) 3841195

FAX
(021) 3857046

EMAIL
listy@bps.go.id

Informasi Umum Kegiatan

FREKUENSI PENYELENGGARAAN
Tiga Tahunan

FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
- Tahunan

TIPE PENGUMPULAN DATA
Cross Sectional

Metodologi

CARA PENGUMPULAN DATA

Kompilasi produk administrasi

CAKUPAN WILAYAH SURVEI

Seluruh kabupaten/kota

JENIS RANCANGAN SAMPEL

METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR

KERANGKA SAMPEL

KESELURUHAN FRAKSI SAMPEL (*OVERAL SAMPLING FRACTION*)

PERKIRAAN *SAMPLING ERROR*

UNIT SAMPEL

UNIT OBSERVASI

Kabupaten/Kota 16

Pengumpulan Data

METODE PENGUMPULAN DATA

- Lainnya

MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY)

Tidak

PETUGAS PENGUMPULAN DATA

- Staf

PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETUGAS PENGUMPULAN DATA

Akademi/Universitas

MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS

Tidak

JUMLAH SUPERVISOR/PENYELIA/PENGAWAS

3

JUMLAH ENUMERATOR/PENCACAH/PENGUMPUL DATA

6

Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis

METODE PENGOLAHAN

Penyahihan (Validasi)

TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN

- Kabupaten/Kota

METODE ANALISIS

Indeks spasial dengan wilayah acuan DKI Jakarta.

UNIT ANALISIS

Kabupaten/kota

PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM

JUDUL PUBLIKASI

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan/ Persiapan	29 Sep 2021 s.d. 29 Sep 2021
Pengumpulan Data	29 Sep 2021 s.d. 29 Sep 2021
Pengolahan	29 Sep 2021 s.d. 31 Oct 2019
Penyajian	29 Sep 2021 s.d. 31 Dec 2019
Analisis	29 Sep 2021 s.d. 30 Nov 2019

Aksesibilitas

Direktorat Diseminasi Statistik
bpsdq@bps.go.id, www.bps.go.id

Persyaratan dan Penolakan

PERSYARATAN

Pengguna data harus menyebutkan nama kegiatan:
Indeks Kemahalan Wilayah, 2019

PENOLAKAN

Pengguna data mengakui bahwa BPS tidak bertanggung jawab atas penggunaan data atau interpretasi atau kesimpulan berdasarkan penggunaan data apabila tidak diketahui atau tidak dikonsultasikan dengan BPS.